**REKRUTMEN POLITIK PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014**

Oleh;

Sugeng

Sugeng.kesuma@gmail.com

Pembimbing: Adlin S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Political parties have a position and a very important role in the democratic system. Political parties play a role as a strategic link between the processes of government to citizens. Every political party has a different recruitment pattern, where the pattern of recruitment of party members adapted to the political system that was followed. In recruiting candidates for legislative in 2014, DPC Hanura Pekanbaru city does not provide equal opportunities to all citizens melain to Hanura own cadres and cadres of the Party coalition to compete in the process of selecting candidates for legislative.

The theory used is the mechanism for recruitment of Czudnowski (in Fadillah Son, 2003) which has two properties, namely: open and closed. By using three indicators, namely: the provision of recruitment, criteria and control candidates for legislative. The type of approach used is qualitative by using the case study method to describe and analyze patterns of recruitment DPC HANURA Party. Subject is Hanura give freedom or the same opportunity to the party cadres coalition to Hanura to become candidates for legislative.

Keywords: Political parties, Political Recruitment, Candidates for Legislative.

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik melalui proses rekrutmen politik. melalui proses rekrutmen politik ini, partai politik berusaha menjaring dan menemukan kader-kader partai yang dianggap bisa menjalankan kekuasaan dengan baik, terutama jika terpilih menjadi

anggota dewan dalam pemilihan umum. Dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, partai politik berpedoman pada landasan hukum yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mana Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Proses rekrutmen politik dilakukan oleh seluruh partai politik yang mengikuti pemilu dengan memperhatikan keadaan calon anggota partai politik yang ingin direkrut dengan cara yang transparan, objektif dan demokratis serta tidak terikat dengan kepentingan salah satu pihak. Tujuannya adalah agar dalam proses rekrutmen ini, akan terpilih nantinya kader partai yang kompeten dan siap bertanggung jawab terhadap jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Kader partai politik berperan penting dalam menjaga kontinuitas partai politik yang menaunginya, untuk itu peran partai politik dalam mencari kader yang demikian sangat vital. Rekrutmen politik setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (*litsus*) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Dalam perekrutan politik anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda

Sebagai salah satu partai politik peserta pemilu, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) juga melakukan proses rekrutmen politik. Sebagai salah satu partai politik yang cukup dikenal dalam kancah perpolitikan Indonesia, Partai

HANURA terus berusaha menjaga keberlangsungan partai yang dianggap sebagai salah satu partai yang bersih dari korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Partai HANURA menyadari betul pentingnya proses rekrutmen yang betul-betul berjalan dengan memperhatikan kepentingan bersama.

Pada pemilihan umum tahun 2009 yang diikuti oleh 55 partai politik, Partai Hanura untuk pertama kalinya menjadi peserta pemilu dengan memegang nomor urut 1 (satu). Melalui pertarungan yang sengit karena jumlah partai yang banyak pada saat itu, Partai Hanura berhasil menempati peringkat 9 dan melewati ambang batas dengan perolehan suara yang cukup signifikan untuk ukuran partai baru yang ikut dalam pemilu. Bersama dengan delapan partai lainnya, Partai Hanura berhak menempatkan wakilnya didalam parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menjelang pemilu 2014 sebanyak 10 partai politik yang tidak lolos verifikasi memutuskan berkoalisi dengan Partai Hanura. Partai-partai tersebut adalah:

1. Partai Damai Sejahtera (PDS)
2. Partai Kedaulatan
3. Partai Republikan
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
6. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
7. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
8. Partai Nasional Republik (Nasrep)

9. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) , dan;

10. Partai Kongres.

(Sumber:

<http://nasional.sindonews.com/read/725815/12/10-parpol-gabung-ke-hanura-1362912504>)

Bergabungnya kesepuluh partai politik ini memberikan dampak positif terhadap perolehan suara partai Hanura, apalagi kemudian ditambah dengan kekuatan bergabungnya CEO MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo yang berpindah dari partai Nasdem cukup dikenal oleh masyarakat dan merupakan pemilik salah satu media terbesar di Indonesia. Menurut Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, bergabungnya kesepuluh partai politik tersebut kedalam Partai disebabkan oleh imej baik yang diterima oleh Partai Hanura sebagai partai “bersih” yang bebas dari korupsi, selain itu faktor lain yang membuat kesepuluh partai tersebut memutuskan bergabung adalah karena internal Partai Hanura dianggap stabil tanpa adanya gejolak partai.

(Sumber: www.tribunnews.com)

Penggabungan partai menurut aturan hukum di Indonesia diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa penggabungan partai politik dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau
2. Menggabungkan diri dengan menggunakan nama,

lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.

Dalam pelaksanaannya, proses bergabungnya partai ke partai yang lain haruslah melalui suatu tahapan yang demokratis, menjunjung tinggi nilai keterbukaan (transparansi) agar tidak terbentur dengan nilai-nilai ideologi partai politik. Proses penggabungan yang transparan juga memberikan informasi kepada publik terkait dengan *track record* partai yang bergabung sehingga akan lebih mudah untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

Partai HANURA untuk kedua kalinya lolos mengikuti pemilihan umum tahun 2014 bersama dengan 11 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2014 ini jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2009, dimana jumlahnya mencapai 38 partai politik. Pengurangan jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu tahun 2014 ini diyakini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi demokrasi. Selama ini, banyaknya partai politik yang menjadi peserta pemilu dianggap kurang menjadikan partai politik dekat dengan masyarakat dan membuat politisi mudah berpindah dari satu partai ke partai lain karena faktor keunggulan partai pendukung maupun faktor lainnya.

Di beberapa daerah, Partai Hanura juga berhasil memperoleh suara yang cukup tinggi dan memperoleh kursi di DPRD. Seperti halnya di Provinsi Riau, Partai Hanura berhasil menempati peringkat ke 9 dari total 10 Partai politik yang memperoleh kursi di

DPRD Provinsi Riau. Sementara di Ibukota Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru, Partai Hanura menempati peringkat ke 8 mengungguli Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra sedangkan hasil pemilihan umum tahun 2014 menempatkan Partai Hanura pada peringkat ke 10 secara nasional,

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat di rumuskan masalah yang menjadi Pertanyaan Peneliti adalah.

- Bagaimana rekrutmen calon legislatif partai Hanura terhadap 10 partai yang bergabung dalam pemilihan umum di Kota Pekanbaru Tahun 2014?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - Untuk mengetahui sistem rekrutmen calon legislatif Partai Hanura terhadap 10 partai yang bergabung di partai Hanura pada pemilihan umum di Kota Pekanbaru Tahun 2014
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau.
 - b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penulisan karya ilmiah dalam departemen ilmu politik terutama terhadap rekrutmen politik yang ada di Indonesia
 - c. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti

sementara di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, Partai Hanura juga berada di urutan ke 10 perolehan suara terbanyak partai politik peserta pemilu. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel perolehan suara Partai Hanura pada pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014.

selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan maupun tujuan praktis.

d. Rekrutmen Politik

Menurut Suharno (2004), rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara / pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara.

Pamungkas (2011) menjelaskan pentingnya rekrutmen politik dimana Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalamannya, dan bagaimana kapasitas politiknya

akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai diruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik.

Selanjutnya Rush dan Althof (dalam Komarudin, 2011) menjelaskan bahwa rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal dan tidak formal. Dikatakan sebagai proses dua arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain, untuk kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu. Rekrutmen disebut formal, jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berpaseleksi atau pemilihan. Disebut sebagai informal apabila para individu direkrut secara sendirian tanpa melaluicara institusional.

Menurut Czudnowski (dalam Fadillah Putra, 2003) mekanisme rekrutmen politik antara lain:

1. Rekrutmen terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham

demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- a. Mekanismenya demokratis
 - b. Tingkat kompetensi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
 - c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
 - d. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi
2. Rekrutmen tertutup, dalam rekrutmen tertutup syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.
- Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka.

Rekrutmen terbuka dan melibatkan banyak orang yang ikut serta dalam pemilihan tersebut dinilai lebih demokratis dibandingkan dengan rekrutmen yang dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan segelintir orang (Hazan dalam Adlin, 2002).

Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

Pippa Norris (dalam Adlin, 2012) menjelaskan bahwa ada 4 hal yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen calon legislatif di berbagai negara, yaitu:

- a. Sistem politik (*political system*) suatu negara, khususnya aturan hukum, sistem kepartaian dan sistem pemilu yang menggambarkan peluang kandidat dalam ruang pasar politik di negara itu.
- b. Proses rekrutmen (*recruitment process*) di internal partai, terutama sekali tingkat demokratisasi di internal partai dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan seleksi kandidat legislatif.
- c. Kandidat yang menawarkan diri untuk mengikuti pemilihan (*supply*), berhubungan dengan tingkat motivasi dan modal politik yang mereka miliki.

- d. Permintaan kelompok penentu kebijakan partai (*demands of gatekeepers*) – misalnya pemilih, anggota partai, donatur partai dan pimpinan partai yang berhak menyeleksi dan menentukan hasil seleksi para calon legislatif.

Selanjutnya, Norris (dalam Adlin, 2012) juga menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi model seleksi kandidat legislatif sebuah negara, yaitu:

- a. Budaya politik dan modernisasi sosial yang terjadi pada sebuah negara
- b. Sejauh mana membuminya sikap egalitarian dan perubahan kebiasaan tradisional
- c. Aturan pemilu yang dipakai di negara tersebut apakah majoritarian, kombinasi atau proporsional, pemakaian kuota gender dan jumlah kursi legislatif yang tersedia
- d. Permintaan kriteria tertentu yang diinginkan oleh para penyeleksi internal partai
- e. Kondisi kandidat yang menawarkan diri yang dianggap memenuhi syarat.
 - a. Model Seleksi Kandidat Demokratis

Dalam negara demokrasi, Hazan dan Rahat (2001) memandang metode seleksi calon sebagai komponen penting dalam demokrasi partai secara internal. Pertama, calon merupakan salah satu aktor utama yang menentukan arah kegiatan partai politik sehingga jadi salah satu pemegang kekuasaan dalam partai. Kedua, seleksi calon juga merupakan komponen utama memahami evolusi

berbagai model organisasi partai yang berbeda. Ketiga, seleksi calon juga memengaruhi faktor luar partai: pilihan yang dihadapi pemilih, komposisi badan legislatif, kohesi fraksi-fraksi di parlemen, kepentingan yang menonjol dalam perdebatan kebijakan, dan produk legislatif. Seleksi calon partai merupakan komponen kunci praktik demokrasi modern sehingga wajib dipertimbangkan dalam menilai apakah negara secara luas sudah demokratis atau belum.

b. Model Seleksi Kandidat Otoriter

Dalam negara otoriter, fungsi partai politik dalam rekrutmen politik ditujukan kepada orang yang berkemampuan mengabdikan pada partai, menguasai ideologi komunisme, dan lainnya. Partai politik berfungsi mengendalikan kehidupan politik masyarakat secara monopolistik (Indah Maisuri, 2011).

f. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan umum merupakan sarana penyalur kedaulatan rakyat dalam menentukan figur yang berhak mewakili suara mereka di dalam parlemen. Dalam pemilihan umum legislatif, partai politik memberikan kesempatan kepada sosok-sosok yang dianggap mampu memimpin masyarakat dan tentu saja jika rekrutmen partai politik terbukti tepat, sosok tersebut akan mampu mendongkrak suara partai dalam pemilihan umum. Asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah Luber Jurdil yang merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan umum legislatif di Indonesia diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur segala macam aturan yang berkaitan dengan pemilihan umum legislatif. Demi menjamin berlangsungnya pemilihan umum yang tertib, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan putusan pengadilan, dll. Sementara itu, ada lembaga yang berperan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum beserta segala macam persiapan pemilihan umum lainnya.

Definisi Konsep

1. Rekrutmen politik suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. (Prudjung, Cheng, 2010²⁷)
2. Pemilihan umum legislatif adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan calon legislatif

(DPR, DPD dan DPRD) untuk mewakili suara rakyat di parlemen.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru. beserta beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan penelitian (Komisi Pemilihan Umum, DPC/DPD Partai HANURA, dll)

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh didalam penelitian ini secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, Peraturan perundang-undangan, jurnal, dan media yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Sumber Data

a. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan dalam pengambilan informan adalah prosedur purposif

yaitu cara menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Sedangkan *key informan* merupakan orang yang dianggap memiliki informasi yang cukup untuk menjawab permasalahan penelitian.

b. Sumber Data Lain

Untuk melengkapi data dalam Penelitian, Peneliti melengkapi data melalui buku-buku, jurnal, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data-data penelitian

6. Teknik Analisa Data

Analisa data atau pengolahan data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu. Namun pendiskrepsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Di Kota Pekanbaru Tahun 2014

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem

demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Seperti yang diungkapkan bapak darnil:

“Partai politik adalah wadah yang memiliki peran besar dalam sistem Pemerintahan, partai mengumpulkan aspirasi masyarakat dan menempatkan wakilnya di pemerintahan melalui mekanisme pemilu.”

Pernyataan bapak danil di atas menegaskan bahwa sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.

Calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sebelum memasuki pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2014, partai-

partai politik peserta pemilu sama-sama melakukan rekrutmen politik demi memperkuat diri menuju pemilihan umum. Tak terkecuali dengan Partai Hanura yang juga melaksanakan rekrutmen politik guna menambah kader baru ataupun menggantikan kader lama yang berpindah partai maupun yang tidak lagi menjadi anggota partai.

Sebanyak 10 (sepuluh) partai politik yang tidak lolos verifikasi partai peserta pemilu pada tahun 2014 memilih untuk berkualisi diri kedalam Partai Hanura. Partai-partai tersebut adalah;

1. Partai Damai Sejahtera (PDS)
2. Partai Kedaulatan
3. Partai RepublikaN
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
6. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
7. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
8. Partai Nasional Republik (Nasrep)
9. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) , dan;
10. Partai Kongres.

Dari sepuluh Partai yang bergabung ke Partai hanura mereka harus melewati beberpa Proses dalam Pencalon anggota legislatif. Ada beberapa tahapan yang di lakukan oleh Panitia rekrutmen Partai hanura terhadap sepuluh Partai yang berkoalisi.

1 . Menjalani Proses Penjaringan Caleg Oleh DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Rekrutmen diartikan sebagai seleksi sebagai seleksi pemilihan atau seleksi seseorang untuk menjadi Caleg sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh partai. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Cara yang ideal untuk melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan seseorang sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen.

Proses rekrutmen dalam Penentuan calon anggota legislatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu;

a. Menentukan Kriteria

Dalam menyeleksi calon legislatif dari Partai yang berkoalisi Partai Hanura menentukan syarat/kriteria Caleg oleh Partai Hanura dielaborasi dengan kriteria yang digunakan untuk memilih dan menetapkan calon legislatif.

1. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif.

2. Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.

3. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

4. Keuangan, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.

5. Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif.

6. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kemampuan yang dimiliki seorang calon legislatif haruslah melebihi dari calon manapun yang dapat menginspirasi masyarakat.

b. Tahap Pengumuman

Pada tahap pengumuman ini Partai Hanura melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon secara terbuka terhadap sepuluh Partai koalisi yang diumumkan melalui ketua Partai yang berkoalisi dan surat pemberitahuan kepada seluruh pengurus, dan simpatisan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

c. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan oleh Partai Hanura yaitu membentuk sebuah Tim yaitu Tim yang bertugas sebagai penjaring dan penyaring. Tugas-tugas tim tersebut, diantaranya, menjaring\ dari ke sepuluh Partai yang berkoalisi kepada Partai Hanura, menyusun kriteria caleg terutama dari sisi kompetensi dan keahlian, serta

menentukan syarat-syarat Caleg yang objektif dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi maupun nepotisme.

d. Tahap Verifikasi

Guna lebih menjamin berjalannya seleksi secara transparan atas dasar kriteria yang ditetapkan partai hanura, setiap pengurus partai pada masing-masing tingkatan di berikan kesempatan untuk di melihat berkas yang telah di berikan. Pada tahap verifikasi ini kegiatan yang dilakukan adalah meneliti kebenaran dan keabsahan atau seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon anggota legislatif.

e. Tahap Seleksi

Pada tahap seleksi ini partai hanura melakukan kegiatan pengkajian terhadap nama-nama bakal calon legislatif yang telah mendaftarkan diri ke Partai hanura, kemudian Panitia akan melakukan Fit and Proper Test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap calon anggota legislatif dalam rangka mengetahui tingkat elektibilitas seluruh bakal calon yang diusulkan.

f. Tahap Evaluasi dan Penilaian Akhir

Pada tahap evaluasi dan penilaian akhir ini bakal calon anggota legislatif ditugaskan, memberikan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja bakal calon anggota legislatif.

2. Pendidikan dan Pelatihan Oleh DPC Partai Hanura Terhadap Calon Legislatif

Sebelumnya kader dari Partai yang berkoalisi mendaftarkan diri ke Partai hanura tidak ada di berikan Pendidikan ataupun Pelatihan ketika mereka mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif, Namun setelah terpilih menjadi calon anggota legislatif dari partai hanura, baik dari caleg PDS dan caleg Partai hanura mereka di berikan Pelatihan bersama-sama dan pembekalan selama 3 (tiga) hari tentang beberapa hal.

Materi pembekalan yang diberikan oleh partai hanura kepada para calon anggota legislatifnya adalah sebagai berikut:

- i. Penyampaian tentang platform, visi, misi dan ideologi partai hanura
- ii. Pemahaman tentang peta politik di Indonesia secara umumnya dan kota Pekanbaru pada khususnya
- iii. Pemberian informasi tentang tata cara pemilihan umum dan metode yang akan digunakan dalam pemilu nantinya

3. Menjalankan Tugas DPC Partai Hanura Kota Pekanbaru

Para Caleg yang sudah lolos dari Partai koalisi di berikan tugas dan tanggung jawab sama dengan calon lainnya yang berasal Partai hanura atas terbentuknya sumber daya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah masyarakat. Caleg yang sudah lolos mempunyai tugas untuk membangun citra partai yang positif di mata

masyarakat. Untuk mengaktualisasikannya secara berkesinambungan dan terus menerus. Adapun tanggung jawab yang diberikan partai DPC Partai Hanura Kota Pekanbaru kepada Caleg partai Hanura adalah membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Caleg partai Hanura harus mendapatkan ruang kekuasaan, dalam konteks positif, supaya partai Hanura berbuat lebih nyata lagi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi elit politik sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Sudah saatnya Partai Politik mengubah mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elit politik yang berkualitas, cakap, kredible, integritas, legitimasi dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat. Sebagai sarana rekrutmen politik, Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Sistem rekrutmen yang diciptakan Partai Hanura yakni rekrutmen terbuka.

B. SARAN

1. Rekrutmen yang dilakukan partai politik ini hanya sebagai ritual politik partai

menjelang Pemilu dilaksanakan. Rekrutmen idealnya berfungsi sebagai proses seleksi terhadap individu yang berada di tingkat akar rumput yang memiliki keinginan, kemampuan, dan integritas untuk menjadi anggota partai politik.

2. Partai politik sudah saatnya mengubah mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elite politik yang berkualitas. Perekrutan itu didasarkan atas faktor kegunaan dan masuknya para calon ke dalam birokrasi biasanya dicapai dengan beberapa bentuk ujian yang dibuat untuk menguji faktor tersebut. Proses rekrutmen dari parpol harus betul-betul diperbaiki.

Dalam melakukan penyeleksian calon legislatif, sebaiknya partai politik melakukannya secara terbuka, di mana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku dan Jurnal

- Buku

- Adlin. 2011. *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum*. Pekanbaru: Alaf Riau

- Aidit, Zaenal. 1989. *Elit dan Modernisasi*. Yogyakarta: Liberty
- Bogdan, Steven. J. Taylor. 1992. *Pengantar metoda penelitian kualitatif : suatu pendekatan fenomenologis terhadap ilmu-ilmu sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fahmi. Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hazan, Gideon Rahat. 2001. *Candidate selection methods: an analytical framework*. New York: Sage Publications
- Huntington. Samuel P. Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Plano. Jack C. dkk. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta. C.V. Rajawali Press
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharno. 2004. *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. UNY
- Surbakti, Ramlan. 2010 *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jurnal
- Field, Bonnie .N. and Peter M Seavelis.2008. *journal Candidate Selection Procedures in Transitional Politities*.
- Maisuri, Indah. 2011. *Partai Politik*. Jurnal Academia.edu

B. Referensi Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pencalegkan

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Referensi Internet

Rico Afrido, 10 partai bergabung ke partai hanura.

<https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=10%20partai%20gabung%20k%20hanura>. Diakses pada tanggal 10 januari 2015, pukul 21.45 wib.

Muhammadfikri, <http://www.radarbangka.co.id/rubrik/detail/global/529/rekrutmenpoliti%20dan-kader-loncat-katak.html> diakses pada tanggal 6 february 2015 pukul 17.00 WIB

Nurjaman, rekrutmen partai poliik dalam pemilihan kader. <http://news.detik.com/read/2009/03/24/133130/1104340/700/4/caramenghitung-perolehan-kursi-parpol-di-dpr-dan-dprd> diakses pada tanggal 16 february 2015 pukul 17.12

Sutihat Rahayu

Suadh, "REKRUITMENT POLITIK"

<https://bukharawrite.wordpress.com/2014/04/02/rekrutmen-politik/> di akses pada tanggal 28 maret 2015 pukul 10 .30 wib